

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan menguraikan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penelitian. Dimana dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan yang bersih.

Untuk mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan reformasi birokrasi dengan visi terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme (*clean government*). Upaya reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan tersebut selaras perwujudan peran APIP yang efektif di dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008 sekurang-kurangnya harus memenuhi:

(1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan (3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2013:3), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (BPKP, 2015).

Salah satu APIP tersebut adalah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di daerah. Tugas perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualitas audit internal yang dilakukan auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan masih belum optimal dimana masih ada temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti oleh auditi, auditor tidak melaksanakan audit sesuai standar audit, auditor tidak memantau tindak lanjut hasil audit. Kualitas pengawasan (audit internal) adalah kesesuaian hasil pengawasan/audit dengan standar (BPKP, 2013). Sedangkan Kualitas audit menurut De Angelo dalam Effendy (2010) adalah sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi auditi. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Dengan kata lain, kompetensi dan independensi dapat mempengaruhi kualitas audit.

Tentunya dalam menghasilkan audit internal yang berkualitas, auditor BPKP harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan pengawasan yang dibebankan kepadanya. Kompetensi yang dimaksud yaitu auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman serta

kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya (Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, 2013). Kompetensi auditor di perwakilan BPKP provinsi Sumatera Selatan kurang optimal, karena masih ada beberapa auditor yang belum mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penugasan audit internal. Selain itu, ada rotasi antar bidang di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yang menyebabkan auditor yang berpengalaman tergantikan oleh auditor yang belum berpengalaman. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Effendy (2010) dan Lukman Harahap (2015), kompetensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor internal pemerintah. Kurang optimalnya kompetensi auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan tentu berdampak pada kualitas audit internal yang akan dihasilkan.

Sikap mental independen sama pentingnya dengan kompetensi dalam bidang praktek akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2013:10), independensi berarti kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung jawab audit intern secara objektif. Independensi juga berarti adanya kejujuran pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta. Independensi auditor perwakilan BPKP provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan audit internal masih terdapat gangguan-gangguan yang menghambat proses audit. Baik gangguan dari pribadi auditor sendiri maupun gangguan dari luar. Menurut Nuraeni (2014), independensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Sehingga apabila independensi auditor terganggu akan berdampak pada kualitas audit yang akan dihasilkan.

Kompetensi dan independensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Namun, belum tentu auditor yang memiliki kedua hal di atas akan memiliki komitmen untuk melakukan audit dengan baik. Sebagaimana dikatakan oleh Goleman dalam Effendy (2010) hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. Menurut Wirasuasti, dkk (2014) motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor internal pemerintah. Semakin baik motivasi auditor dalam melaksanakan tugas audit maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Jadi, berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul: **“Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Internal (Studi Kasus pada Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

berpengaruh terhadap kualitas audit internal?

2. Apakah independensi auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan berpengaruh terhadap kualitas audit internal?

3. Apakah motivasi auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan berpengaruh terhadap kualitas audit internal?

4. Apakah kompetensi, independensi, dan motivasi auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit internal?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan terhadap kualitas audit internal.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan terhadap kualitas audit internal
3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan terhadap kualitas audit internal
4. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan secara bersama-sama terhadap kualitas audit internal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan kajian berupa sumbangan pemikiran tentang kualitas auditor dan pelatihan yang dibutuhkan agar dapat meningkatkan kualitas audit internal Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan di masa yang akan datang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kompetensi, independensi, motivasi dan kualitas hasil audit.
3. Bagi akademisi, memberikan kontribusi menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini akan disajikan sistematika penulisan yang terdiri dari Bab satu – lima. Bab satu tentang pendahuluan yang berisikan: pertama, latar belakang masalah yang berisikan tentang permasalahan penelitian dan mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti. Kedua, rumusan masalah yaitu rumusan secara kongkrit tentang masalah yang ada. Ketiga, tujuan penelitian di mana dalam bagian ini mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Keempat, manfaat penelitian di mana pada bagian ini mengungkapkan pihak atau orang yang akan memperoleh manfaat dan bentuk manfaat dari hasil penelitian. Dan kelima, sistematika penulisan.

Bab dua mengenai landasan teori yang berisikan: pertama, telaah teori yang memuat uraian yang sistematis, runtut, dan rasional tentang teori dasar yang relevan dan fakta dari hasil penelitian sebelumnya. Kedua, kerangka berpikir di mana kerangka berpikir disintesis, diabstraksi, dan dieksplorasi dari berbagai teori atau pemikiran ilmiah, yang mencerminkan paradigma sekaligus tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian dan untuk merumuskan hipotesisnya. Ketiga, hipotesis penelitian yang merupakan proposisi keilmuan yang dilandasi oleh kerangka konseptual penelitian. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian dan diuji kebenarannya melalui pengolahan data statistik.

Bab tiga tentang metode penelitian yang berisikan: pertama, desain penelitian, jenis, dan metode pengumpulan data yang mengungkapkan jenis penelitian yang dilakukan dan cara pengumpulan data. Kedua, populasi dan sampling penelitian yang berisikan penjelasan populasi subyek penelitian, sampel penelitian, besar sampel minimal yang memenuhi kelayakan pengujian statistik, dan teknik pengambilan sampel. Ketiga, variabel penelitian dan definisi variabel penelitian yang berisikan identifikasi variabel yang diteliti, kemudian memuat batasan dan pengukuran masing-masing variabel. Keempat, instrumen penelitian yang berisikan tentang macam spesifikasi instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Kelima, lokasi dan waktu penelitian yang memuat lokasi penelitian dan periode penelitian yang diambil datanya. Keenam, teknik analisis yang menguraikan tentang cara pengujian yang digunakan dalam menganalisis data.

Bab empat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan: pertama, data penelitian, kedua hasil penelitian, dan yang ketiga pembahasan. Bab lima tentang kesimpulan dan saran yang berisikan: pertama, kesimpulan dan kedua saran.

